

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Dana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian,

Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

### **Dokumen Resmi**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Jabatan Notaris.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pandangan dan Pendapat Presiden Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jakarta, 12 September 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Risalah Resmi Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI, Jakarta, 6 Maret 2012.

### **Buku (*Books*) dan Jurnal (*Journals*)**

A. A, Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya dan Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking, Jurnal Konstruksi Hukum 1, No. 2 (Oktober 2020): 232-236, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2599.232-236>.

Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Adolf, Jozan, dan Widhi Handoko dan Muhammad Azhar, Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta di Bidang Pertanahan, *Notarius* 13, No.1, (Maret 2020): 181-192, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.

Agung Prastomo, Dimas dan Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Jurnal Akta 4, No. 4

(Desember 2017):727-738, diakses pada 25 April 2025 pukul 10:51,  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2519/1881>.

Alpert, Julia Gladstone, "The Survey of the Law of Cyberspace: Introduction", The Business Lawyer, Vol. 53, No. 1 (November, 1997), pp.217-223, American Bar Association, diakses pada Senin, 18 Desember 2023 pada pukul 17:01:18 +00:00, Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40687782>

Ali, Achmad, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis), PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Alwajdi, Muhammad Farid , Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia, Jurna Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 2, (Agustus 2020): 257.  
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.422>.

Amirrudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Angling W, Richard, Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan, UNES Law Review 6, No.4 (Juni 2024): 10398-10406. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Anny Mawartiningsih dan Maryanto, Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda, Jurnal Akta 4, No.2, (Juni 2017): 119-124.

Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

Avellan, A V Juan, 1988, *John Hancock in Borderless Cyberspace: The Cross-Jurisdictional Validity of Electronic Signature and Certificates in Recent Legislative Texts*, Jurimetrics, Vol. 38, No.3 (Spring, 1988), pp. 301-316, American Bar Association, diakses pada Rabu, 13 Desember pada pukul 15:26:12 +00:00 Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/29762552>.

Basoeky, Unggul, Fx Joko Priyono, Siti Malikhatun Badriyah, S Sukirno, (2021). Law and Technology: Legal Technology Model under the Authority of the Indonesian Notary Position in the Industrial Revolution Era 4.0. Legal Brief, 11 (1) 353-365.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tiga Dekade Prolegnas dan peran BPHN, Perpustakaan Hukum Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, Dep.Hukum dan HAM, Jakarta, 2008.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Cipto Handoyo, B. Hestu, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Darmini, Ninik, Tanggung Jawab Notaris dalam Kewenangannya Melakukan Legalisasi Perjanjian di Bawah Tangan, *Udayana Master Law Journal* 12, No.4, (Desember 2023): 902-921, diakses pada 25 April 2025 pukul 11:57, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/106657/52967>.

E. Utrecht dan Muh Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1961.

Erwinsyahbana, Tengku dan Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Lentera Hukum*, 5, No.2 (July 2018): 323-340. <https://doi.org/10.19184/ejhlh.v5i2.7339>.

Faerber, C. N. (1999). Book Versus Byte: The Prospect and Desirability of a Paperless Society, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 797, 1999.

UIC John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, 17 (3), 4.

Gede Atmadja, I Dewa, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis and Historis*, Malang, Setara Press, 2013.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Andi Offset, 2000.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi 11, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

HS, H. Salim dan Erlies Septiani N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

\_\_\_\_\_, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

Hoecke, Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?, Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon, 2011.

Kelsen, Hans, 1978, *Pure Theory of Law*, University California Press, Berkeley, Terjemahan Raisul Mutaqqin Cetakan I, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Hans Kelsen*, 2006.

Kurniati, Dea Eling dan Elwi Danil, Yasniwati, Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru, *SwaraJustisia* 9, No.1 (April 2025): 13-26.  
<https://doi.org/10.31933/d0b0zw38>.

Klaus W Grewlich, Governance in "Cyberspace" acces and Public Interest in Global Communication, 1st Edition, Springer Netherland, The Netherland, 1996.

Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung. 2006.

Luthan, Salman, Hubungan Hukum dan Kekuasaan, *Jurnal Hukum* 14, No. 2 (April 2007): 166-184. diakses pada Senin 28 April pukul 15:19, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1066/1807>.

MD, Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012.

MD, Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.

M Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Miller, Fred, "Aristotle's Political Theory", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2022 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), diakses pada 21 Maret 2025. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/aristotle-politics/>.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Unram Press, 2020.

Raco, J.R, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta, PT Grasindo, 2010.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Cet.V, Bandung, Citra Bakti, 2000.

\_\_\_\_\_, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indoensia, Cet. II, Jakarta , Buku Kompas, 2006.

Rahmatullah, Bintang, Cindy Alisia Artanty dan Dedy Muharman, Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 7, No. 3 (Juli 2024), diakses pada Jumat 17 April 2025, pukul 05:50 <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31549/21285>

Qamar dan Salle, Logika dan Penalaran dalam Ilmu hukum, SIGn, Makassar, 2018.

Samudera, Satrio Arung, Saidin, dan Rudy Haposan Saihaan, Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Normatif 1, No. 2, (Desember 2021), diakses pada Jumat 18 April 2025 pukul 04:59, <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/96>.

Schamndt, Henry J, A History of Political Philosophy, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Schwab, Klaus, The Fourth Industrial Revolution, Geneva, World Economic Forum, 2016.

Setya Pratiwi, Ceklis et.al, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2012.

\_\_\_\_\_, dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010.

Shook, John R, 2009, Comparative Political Philosophy Categorizing Political Philosophies Using Twelve Archetypes, Metaphilosophy, October, Vol.40, No.5 (October 2009), pp. 633-655. Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/24439723>.

Sulihandri, Hartanti & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta Timur Dunia Cerdas, 2013.

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1999.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Cyndiarnis Cahyaning, Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Melalui Cybernotary, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Dwike Septiningrum, Tinjauan Terkait Eksistensi Cyber Notary Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Fidwal Indrajab, Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Hikma Jaya, Politik Hukum dalam Penataan Formasi Jabatan Notaris Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Maria Evani Oktabela, Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik (cybernotary), Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Murfiatul Maulida, Peran Cybernotary dan Implikasi Hukum terhadap Jabatan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, 2012.

### **Bahan Kuliah**

Ismail, Nurhasan, Metodologi Penelitian Hukum Untuk Mahasiswa Ilmu Hukum S2, PowerPoint Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.

### **Websites/Internet**

Hukumonline; <https://www.hukumonline.com>

Merriam Webster Dictionary; <https://www.merriam-webster.com>

Cambridge Dictionary; <https://dictionary.cambridge.org>

Black Law Dictionary; <https://thelawdictionary.org>

Irma Devita, Info Kenotariatan dan Pertanahan, Kongres Notaris Internasional ke-29 di Jakarta dipublikasikan 1 Desember 2019, <https://irmadevita.com/2019/notaris-dalam-pusaran-revolusi-industri-dan-era-disrupsi/> , diakses pada 26 Agustus 2021.

Berita Humas, Disrupsi Teknologi Presiden Jokowi Tas Notaris Harusnya Ada Tas Laptop yang Terkoneksi Internet, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dipublikasikan 28 November 2019, <https://setkab.go.id/disrupsi-teknologi-presiden-jokowi-tas-notaris-harusnya-ada-laptop-yang-terkoneksi-internet/>, diakses pada 3 September 2022.

Komdigi.go.id, Disrupsi Teknologi, Presiden Tas Notaris Harusnya Ada Laptop Yang Terkoneksi Internet, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disrupsi-teknologi-presiden-tas-notaris-harusnya-ada-laptop-yang-terkoneksi-internet>, diakses pada 20 Maret 2025.

Setneg go.id, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kecerdasan Digital, Disrupsi dan Indonesia Maju, diakses pada 20 Maret 2025, [https://www.setneg.go.id/baca/index/kecerdasan\\_digital\\_disrupsi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/kecerdasan_digital_disrupsi_dan_indonesia_maju).

Setneg go.id, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Buka Kongres ke-29 Notaris Dunia, Presiden Jokowi Ingatkan Tantangan Era Disrupsi Terhadap Layanan Kenotariatan, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 21:04 WIB. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pers-harus-adaptif-di-era-disrupsi-teknologi/>.

IDLC ID Youtube, Pidato Jokowi dalam Pembukaan Kongres Notaris Internasional, <https://www.youtube.com/watch?v=rC5gljX2Ww4>, diakses 26 Agustus 2021.

AntaraNews, Presiden Jokowi Menyinggu Isi Tas Notaris, diakses 20 maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/1184307/presiden-jokowi-menyinggung-isi-tas-notaris>.

### **Lainnya**

Seminar Nasional yang dihadiri oleh Penulis pada hari Jumat 1 Maret 2024 bertempat di Gedung RSG lantai 4, Gedung 2 Universitas Padjajaran